

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur seusianya. Masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya (Kemenkes 2018). Ramayulis dkk (2018) didalam (Saufi, 2021) menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada bayi di usia 0-11 bulan dan balita di usia 12-59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sehingga anak tersebut terlalu pendek untuk seusianya. Stunting juga dapat disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya praktik pengasuhan gizi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, masa kehamilan maupun setelah melahirkan.

Prevalensi stunting tertinggi berada pada wilayah Afrika dan Asia. Negara Indonesia termasuk dalam lima besar negara di dunia untuk jumlah stunting pada anak sekitar 37,2% ditahun 2013. Pertumbuhan pada masa kontemporer sangat penting karena merupakan salah satu indikator kesehatan di masa dewasa pada anak WHO (World Health Organization) dalam (Sukmawati et al., 2018). Di tahun 2021 prevalensi stunting di Indonesia 24,4% turun menjadi 21,6 % tahun 2022 (Kemenkes, 2022). Sedangkan prevalensi stunting Kabupaten Kampar diatas rata-rata nasional di angka 25,07% pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14,05% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan secara berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia, melestarikan alam, serta menjadi acuan dalam kerangka pembangunan di negara-negara yang ada di dunia. Didalam penelitian (Saufi, 2021) menyebutkan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai yang salah satunya adalah menghilangkan kemiskinan ataupun kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Permasalahan stunting ini tidak dapat diabaikan atau dinomorduakan karena mengingat dampak yang akan ditimbulkan dari permasalahan stunting cukup fatal. Dampak jangka pendek stunting ini adalah akan menimbulkan tingginya resiko morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian). Sedangkan, dampak jangka menengah akan menimbulkan rendahnya tingkat intelektualitas dan gangguan kognitif pada anak sehingga kemampuan otak anak tidak dapat berkembang dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil riset OECD PISA (Organization for Economic Cooperation and Development-Programme for International Students Assessment) menyatakan bahwa anak dengan pertumbuhan normal sel otaknya akan berkembang secara baik dengan cabang sel yang panjang. Sementara, pada anak yang terdampak stunting sel otaknya berkembang sangat terbatas, sehingga bercabang secara tidak normal dan memiliki cabang yang lebih pendek dari anak normal seusiannya. Hal ini akan mempengaruhi terhadap tingkat kecerdasan atau kemampuan intelektualitas nya. Kemudian dampak jangka panjang akan menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan

timbulnya penyakit degeneratif pada anak di masa dewasa (Ipan et al., 2021).

Stunting memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak dan juga perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dampak stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak dapat merugikan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia dibawah dua tahun. Anak-anak yang mengalami stunting pada umumnya akan mengalami hambatan kognitif dan motoriknya dan akan mempengaruhi produktivitas saat dewasa. Selain itu, anak stunting juga memiliki resiko yang lebih besar untuk menderita penyakit seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa. Stunting dan permasalahan kekurangan gizi yang terjadi pada balita erat kaitannya dengan kemiskinan. Daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga (Kementerian Kesehatan RI, 2018b).

Perhatian Pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting cukup serius yaitu dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan dalam menangani permasalahan stunting. kebijakan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi dan kebijakan-kebijakan lain untuk mendukung penanganan stunting. kemudian permasalahan stunting ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kebijakan-kebijakan di atas merupakan pedoman bagi daerah dalam penanganan permasalahan stunting yang ada di daerah khususnya Kabupaten Kampar. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tanggal 15 Desember 2018 tentang Kegiatan Padat Karya dan Penanganan Stunting, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai Kabupaten Locus Stunting Tahun 2019. Maka Kabupaten Kampar yang mempunyai peraturan khusus terkait penanganan stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. Dan kemudian ditahun 2022 mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 050.13-290/I/2022 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kampar.

**Tabel 1. 1 Daftar Lokasi Prioritas Focus Penanganan Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022**

No	Kecamatan	Balita Status “Sangat Pendek”	Balita Status “ Pendek”
1.	Kampar	28	87
2.	Tambang	180	209
3.	Siak Hulu	0	21
4.	Kuok	21	19
5.	XIII Koto Kampar	90	72
6.	XIII Koto Kampar Hulu	134	93
7.	Kampar Kiri	14	32
8.	Kampar Kiri Hilir	9	10
9.	Kampar Kiri Hulu I	157	57

10.	Kampar Kiri Hulu II	10	33
11.	Tapung I	18	30
12.	Tapung II	61	152
13.	Tapung Hilir I	61	90
14.	Tapung Hilir II	26	18
15.	Tapung Hulu	167	149
16.	Salo	183	114
17.	Koto Kampar Hulu	19	7
Jumlah		1.178	1.193

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar 2022*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak stunting di Kabupaten Kampar masih cukup tinggi. Sehingga dengan hal itu perlu dilakukan sebuah kolaborasi lintas stakeholders. Berdasarkan data di lapangan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar telah berjalan dengan adanya keterlibatan Pemerintah, Akademisi dan Pihak Swasta (Perusahaan). Kemudian keterlibatan masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu, namun masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam hal tersebut.

Perlu berbagai pendekatan dari berbagai pihak untuk benar-benar memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, konsep dan model *Collaborative Governance* merupakan salah satu alternatif saat ini yang memungkinkan untuk memberikan jawaban dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi permasalahan penanganan *stunting*.

Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar saat ini sudah melibatkan peran pemerintah, akademisi maupun pihak swasta (perusahaan). Hal itu sesuai dengan instruksi dari Pemerintahan Pusat bahwa dalam penanganan stunting perlu melibatkan berbagai stakeholders lintas sektor. Karena mengingat permasalahan stunting tidak bisa hanya pemerintah saja yang bergerak, melainkan juga perlu keterlibatan sektor lainnya. Oleh karena itu, collaborative governance merupakan langkah ataupun salah satu solusi alternatif untuk penanganan stunting di Kabupaten Kampar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan *Collaborative Governance* serta regulasi-regulasi dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Kampar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah disusun, maka tujuan dalam penelitian bertujuan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar serta regulasi- regulasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kajian studi ilmu pemerintahan khususnya pelaksanaan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Pemerintah**

Dapat mengetahui bahwa kebijakan yang berdasarkan regulasi, intruksi maupun keputusan yang diterapkan dapat dilihat apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebaliknya. Dan diharapkan dapat menambah masukan bagi pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan Collaborative Governance.

#### **b. Akademisi**

Dapat mengetahui bagaimana proses kolaborasi dilakukan apakah telah memberikan dampak yang baik terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya menyelesaikan penanganan stunting di Kabupaten Kampar. Dan Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi akademisi terkait pengembangan pengetahuan dan inovasi terhadap suatu kebijakan dalam melakukan proses kolaborasi.

#### **c. Pihak Swasta (Perusahaan)**

Pihak Swasta dapat melihat bahwa kerjasama yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama pemerintah.

### 1.5 Literature Review

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji terkait Collaborative Governance, dapat ditemui dalam sejumlah literatur. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan topik penelitian yang akan diangkat, dapat di lihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1. 2 Literature Review**

No	Judul	Penulis	Tahun	isi
1.	Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman <a href="http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/418">http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/418</a>	Sukanti, Nur Faidati	2021	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik. Namun beberapa indicator belum berjalan dengan baik yaitu ditandai dengan forum komunikasi belum tersedia secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran pihak swasta.
2.	Collaborative Governance Dalam Peningkatan Hasil Produktivitas Kakao Di Kecamatan Ngapa <a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11017-Full_Text.pdf">https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11017-Full_Text.pdf</a>	Setiawati	2020	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam meningkatkan hasil produktivitas kakao di Kecamatan Ngapa belum berjalan dengan baik dan belum maksimal, namun sejauh ini ada upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk memperbaikinya, baik dari segi bibit maupun pembagian



				pupuk serta masih terbatasnya sarana dan prasarana.
3.	<p>Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung</p> <p><a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11145">http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11145</a></p>	<p>Zulhadi, Andi Pitono, Ella L. Wargadinata</p>	2023	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan Bahwa secara garis besar proses kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan cukup baik berdasarkan dimensi Collaborative Governance Anshel dan Gash. Namun dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung khususnya (Citarum Harum Sektor 1) hanya melibatkan antara pemerintah dan masyarakat saja, disini dalam proses kolaborasi peran dari pemerintah terlihat sangat dominan, sedangkan kolaborasi dengan pihak swasta belum terlihat.</p>
4.	<p>Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19.</p> <p><a href="https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/40">https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/40</a></p>	<p>Ahmad Saufi</p>	2021	<p>Dinamika Collaborative Governance dalam penanganan stunting di Provinsi Jawa Timur masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan tersebut terjadi bahwa masih dominannya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan bersifat sentralistik dan lemahnya aturan hukum tentang kewajiban para pihak atau stakeholders serta lemahnya mengakomodir sumberdaya dukungan dari luar pemerintah seperti perusahaan akademisi, masyarakat maupun media-media. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan proses kolaborasi tidak berjalan dengan baik.</p>

5.	<p>Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Stunting Di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p><a href="http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&amp;id=8473&amp;keywords=">http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&amp;id=8473&amp;keywords=</a></p>	Faldianus Alvidolatu	2021	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua hal yang menjadi basic persoalan, Pertama; manajemen ketatalaksanaan yang belum optimal, terutama berkaitan dengan akurasi data, integrasi kebijakan antara sektor dan mental set birokrasi (ketidaksamaan melihat stunting sebagai problem urgen). Kedua; manajemen kelembagaan, dalam hal ini komunikasi antara stakeholder baik secara vertikal maupun horizontal kurang optimal. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang berlangsung adalah kolaborasi cangkang (pseudo partnership) dimana aktor yang terlibat terlihat dalam satu wadah yang sama akan tetapi kenyataanya ada jarak atau gap penghalang antara stakeholder yang terlibat.</p>
6.	<p>Collaborative Governance Di Kabupaten Bone Dalam Upaya Penanganan COVID-19</p> <p><a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31753-Full_Text.pdf">https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/31753-Full_Text.pdf</a></p>	Sahrul Gunawan	2022	<p>Didalam penelitian ini hanya menjelaskan peran pemerintah, swasta dan masyarakat tanpa melibatkan peran akademisi sebagai pengetahuan manajemen dan dalam memberikan inovasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan.</p>
7.	<p>Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang</p> <p><a href="https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1172">https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1172</a></p>	Ilham Nur Hanifan Maulana, Qomariyatus Sholihah, Wike	2022	<p>Penelitian ini menjeaskan Beberapa kegiatan intervensi gizi spesifik tidak terlaksana akibat refocusing anggaran kesehatan. Namun, dukungan agen pelaksana kebijakan seperti petugas gizi di puskesmas dan bidan desa tetap menjadi aktor kunci intervensi gizi spesifik dilapangan sesuai dengan timeline aksi integrasi stunting. Perlunya regulasi teknis sebagai tindak lanjut Perbup Malang</p>

				Nomor 33 Tahun 2018 yang mengakomodir penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dimasa pandemi secara optimal.
8.	<p>Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)</p> <p><a href="https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824">https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824</a></p>	Ranggi Ade Febrian	2016	Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep Collaborative Governance adalah kurang berjalannya sistem konteks yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, drivers yang dilihat dari elemen leadership yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral.
9.	<p>Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar</p> <p><a href="http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2219">http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2219</a></p>	Putu Nomy Yasintha	2020	Hasil penelitian ini adalah dimana pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar hanya mengandalkan pemerintah saja, kontribusi dari pihak swasta masih kurang maksimal. Selain itu, belum terdapat aturan ataupun regulasi yang jelas dari pihak desa adat sehingga masyarakat belum mempunyai peran yang jelas dalam pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar.

10.	Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance	Kanaya Avitadira, Novie Indrawati	2023	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa Collaborative Governance dalam Upaya Mengatasi Permasalahan sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Pihak Swasta yakni PT Solusi Bangun Indonesia, dan masyarakat Proklamasi Lestari 03 Cempaka Putih Timur. Seluruh pemangku kepentingan sepaham bahwa program kolaborasi upaya mengatasi mengatasi permasalahan sampah memiliki dampak yang positif baik dari segi lingkungan, teknologi, maupun ekonomi. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara terpisah seperti hanya Dinas Lingkungan Hidup dengan PT Solusi Bangun Indonesia, sedangkan antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada diadakan duduk bersama ataupun diskusi dan ini menandakan proses kolaborasi tidak berjalan dengan baik meskipun program tetap berjalan hingga saat ini.</p>
-----	---	--------------------------------------	------	--

Dari 10 penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pada penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait Collaborative Governance yaitu hanya menjelaskan Collaborative Governance dalam penanganan stunting sudah berjalan dengan baik dengan tolak ukur konsep teori yang ada, belum terlihatnya bentuk keterlibatan langsung Pemerintah, Akademisi dan Pihak Swasta (Perusahaan) dengan menggunakan model triple helix dalam Collaborative Governance, belum

adanya regulasi yang dilakukan Pemerintah daerah dalam proses Collaborative Governance terhadap permasalahan yang diteliti.

Sehingga peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan Collaborative Governance dengan regulasi yang ada Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar, dengan adanya keterlibatan secara langsung antara Pemerintah, Akademisi, dan Pihak Swasta (Perusahaan) dengan menggunakan teori Ratner (2012), yang antara lain : Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*), Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*). Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*).

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Definisi, Konsep dan Kajian Teori Collaborative Governace**

#### **a) Definisi Governace**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Collaborative Governance, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai governance. Konsep governance berangkat dari istilah government. Government atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Kemudian menurut (Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018) Government adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemerintahan. Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintah merujuk pada kepala desa beserta perangkat desa. Konsep government ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan

pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah.

Arti kata “govern” yang berarti mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah Dwiyanto dalam (Setiawati, 2020). Dalam konsep governance, pemerintah atau government merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

**b) Definisi *Collaborative Governance***

Secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yakni “colabour” yang dapat diartikan bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang sehingga organisasi pada masa itu menjadi lebih kompleks. Divisi-divisi dalam struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi anggota ataupun tenaga kerja didalam organisasi terkait. Kompleksitas organisasi tersebut harus berkolaborasi demi tercapainya tujuan bersama menurut Wanna dalam (Anshar, 2018).

Menurut (Setiawati, 2020) bahwa Kolaborasi dipahami sebagai kerja sama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Kemudian Collaborative Governance merupakan proses yang didalamnya terdapat berbagai stakeholders yang terlibat guna mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut Ansell and Gash dalam (Setiawati, 2020) bahwa collaborative governance sebagai sebuah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga public yang melibatkan secara langsung stakeholder diluar pemerintah didalam proses pembuat kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang kemudian bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengatur program-program yang akan dilaksanakan.

Kemudian Konsep Collaborative Governance menurut Mahsyar et al., 2021 dalam (S. Gunawan, 2022) Merupakan sebuah konsep yang melibatkan institusi-institusi yang terkait yang tengah memulai usaha kerjasama serta munculnya ide-ide atau gagasan dari masing- masing institusi (stakeholder) dalam menentukan atau mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Purwanti dalam (Rasyid, 2016) Konsep kolaborasi merupakan bentuk kerjasama dimana peranan dan fungsinya melengkapi kekurangan satu sama lain. Terbatasnya kemampuan pemerintah, jaringan maupun sumber daya yang merupakan faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan, mendorong pemerintah agar melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat sehingga dapat terjalin kolaborasi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

### c) **Kajian Teori *Collaborative Governance***

Kolaborasi adalah hal yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam

penyelenggaraan kebijakan pemerintah saat ini, karena dengan kolaborasi lintas stakeholders dapat melengkapi berbagai permasalahan. Junaidi (2015;8) menjelaskan bahwa Collaborative Governance tidak akan muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di hadapi oleh masyarakat.

Dalam kolaborasi dibutuhkan keterlibatan stakeholders sesuai peran masing-masing pihak. Stakeholders dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan yang memiliki hubungan terhadap suatu permasalahan di dalam organisasi atau lingkungan. Terdapat beberapa model collaborative governance (Astuti, Warsono and Rachim, 2020) yang melibatkan stakeholders yaitu sebagai berikut :

- a. **Triple Helix**, terdiri dari tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan (pihak swasta) dan akademisi (universitas)
- b. **Quadra Helix**, terdiri dari empat pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan (pihak swasta), akademisi dan civil society (masyarakat).
- c. **Penta Helix**, terdiri dari lima pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan (pihak swasta), akademisi, civil society (masyarakat) dan media massa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Collaborative Governance Triple Helix yang terdiri dari pemerintah, akademisi dan perusahaan (pihak swasta). Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menanggulangi



penanganan stunting tidak bisa mengandalkan internal pemerintah saja. Pemerintah juga membutuhkan peranan serta fasilitas yang didukung oleh pihak swasta dan akademisi. Maka peneliti akan melihat proses kolaborasi yang berlangsung sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar.

Menurut Etzkowitz & Leydesdorff dalam (Hamidah et al., 2019) Gagasan utama Triple Helix adalah tentang kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif. Konsep triple helix hadir saat perang dunia kedua sedang berkecamuk Perang tersebut melahirkan konsep hubungan yang begitu komperhensif antara ilmu pengetahuan (akademisi), sektor industri atau perdagangan (dunia usaha) dan sektor publik (pemerintah) (Etzkowitz, 2008).

Model triple helix sangat dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan masalah multi sektor dimana para pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu isu (Leydesdorff, 2020). Kolaborasi dari ketiga pemangku kepentingan tersebut diharapkan mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. Berikut adalah peran dari masing-masing pemangku kepentingan.

**a. Pemerintah (Government)**

Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan atau regulasi. Kelompok ini mencakup organisasi yang didanai publik seperti parlemen, kepolisian, militer, rumah sakit dan layanan publik lainnya.

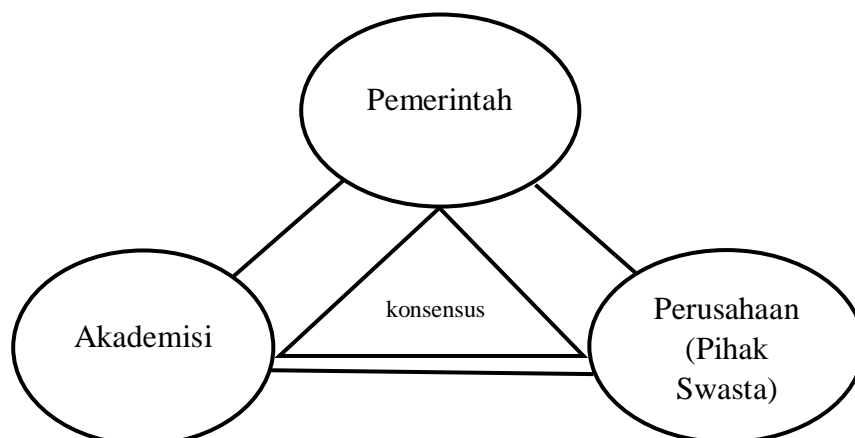
**b. Akademisi (Universitas)**

Akademisi memiliki peranan untuk melakukan penelitian atau riset mengenai isu-isu tertentu. Akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk pengembangan proyek/kebijakan. Anggota kelompok ini sering mengungkapkan pendapat-pendapat yang kuat dan relevan dengan masalah.

**c. Perusahaan (Pihak Swasta)**

Swasta atau bisnis memiliki peran sebagai yang memiliki modal dan bergerak dibidang usaha tertentu dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Kepentingan komunitas ini akan tergantung pada bagaimana proyek akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis mereka.

**Gambar 1. 1 Teori Triple Helix Menurut Henry Etzkowitz**



**d. Proses Kolaborasi**

Proses-proses dari kolaborasi dapat dilakukan dengan beberapa tahap.

Dengan tahapan model kolaborasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan dari permasalahan publik. Meskipun proses-proses kolaborasi sulit dilakukan ataupun dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap stakeholders yang berbeda satu dengan lainnya.

Menurut Ratner, di dalam *collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintah. (Ratner, 2012:5) yaitu:

1) *Identifying Obstacles and Opportunities* (fase mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan stakeholders atau pemangku kebijakan melakukan kolaborasi dengan mengidentifikasi mengenai berbagai jenis hambatan dan peluang yang akan dihadapi selama proses kolaborasi berjalan. Kemudian menerangkan mengenai permasalahan yang diterangkan oleh setiap stakeholders yang terlibat dan memperhitungkan peluang seperti solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Setiap stakeholders memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pada permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing stakeholders.

2) *Debating Strategi For Influence* (Face Dialog).

Pada tahap Debating Strategi For Influence atau Strategi Debat Untuk Mempengaruhi, stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata

kelola pemerintahan ataupun dalam proses kolaborasi melakukan dialog atau diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah-langkah dipilih secara efektif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

### 3) *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melakukan tahap mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang paling efektif untuk mengantisipasi permasalahan. Dan pada tahap *Planning Collaborative Actions* atau Merencanakan Tindakan Kolaborasi, maka stakeholders melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah di diskusikan pada tahap sebelumnya seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar stakeholders yakni Pemerintah, Swasta dan Akademisi. Kemudian mengidentifikasi pengukuran disetiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berjalan dalam jangka panjang.

## **1.6.2 Definisi dan Konsep Dasar Stunting**

### **a) Definisi Stunting**

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur seusianya. Masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya (Kemenkes 2018) didalam (Sukanti & Faidati, 2021).

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis pada anak yang kemudian disebabkan oleh asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Terjadinya stunting saat dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini akan meningkatkan angka kematian pada bayi dan anak, menyebabkan anak tersebut mudah terkena penyakit dan memiliki postur tubuh yang tidak maksimal saat beranjak dewasa (Millennium Challenge Account Indonesia, 2014). Sama halnya menurut peneliti stunting bahwa stunting adalah masalah gagal tumbuh yang terjadi pada balita karena asupan gizi yang kurang didapatkan balita sejak lahir sehingga anak menjadi pendek maupun sangat pendek jika dibandingkan dengan anak seusianya.

**b) Indikator stunting**

Negara-negara berkembang dan salah satunya Indonesia memiliki beberapa masalah gizi pada balita, di antaranya wasting, underweight, overweight, dan stunting. Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. Stunting menurut WHO Child Growth Standard dengan batas (*z-score*)  $< -2$  SD (WHO, 2010).

Indikator berdasarkan TB/U menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/ pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan sehingga menyebabkan anak menjadi pendek (Balitbangkes, 2013).

Antara lain indikator stunting adalah hambatan pertumbuhan dalam

kandungan, asupan zat gizi yang tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada masa bayi dan anak-anak serta seringnya terkena penyakit infeksi selama masa awal kehidupan, anak memiliki panjang badan yang rendah ketika lahir, anak yang mengalami berat lahir yang rendah pada saat dilahirkan dan pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai menurut usia disertai dengan konsistensi makanannya (Sukmawati et al., 2018).

**c) Klasifikasi Stunting.**

Balita pendek dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang dan tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasilnya berada di bawah normal (Kementerian Kesehatan RI, 2016b). Menilai status gizi dapat menggunakan tinggi badan dan umur yang dikonversikan dalam *z-score*. Nilai *z-score* dapat dicari menggunakan rumus atau aplikasi dari WHO (*WHO Anthro*). Berdasarkan nilai *z-score* masing-masing indikator tersebut ditentukan status gizi balita sebagai berikut :

**Tabel 1. 3 Pengelompokan Status Gizi (TB/Umur) Berdasarkan Z-Score**

<b>Indeks</b>	<b>Status Gizi (TB/Umur)</b>	<b><i>z-score</i></b>
TB/U	Sangat Pendek	< -3,0
	Pendek	≥ -3,0 s/d <-2,0
	Normal	≥ -2,0 s/d <2,0

*Sumber : (Kementerian Kesehatan RI, 2019)*

**d) Faktor penyebab risiko stunting.**

Stunting terjadi dikarenakan asupan gizi nutrisi yang kurang baik dan kurang gizi akut yang berlangsung lama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Akumulasi kedua kondisi tersebut terhitung dari 1.000 HPK mulai dari dalam kandungan sampai 24 bulan setelah dilahirkan dan kondisi stunting terjadi mulai

dari janin hingga saat bayi di lahirkan. Akan tetapi, stunting mulai nampak dan dapat diketahui setelah bayi berusia 24 bulan atau dua tahun. Dan faktor lainnya disaat awal kehidupan, kurang baik nya pola asuh ibu terhadap anak (Maulana et al., 2022). Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting sebagai berikut :

1) Praktek perawatan anak yang kurang baik

Beberapa fakta yang ada di Indonesia dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif dan tidak ada pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Makanan Pendamping Air Susu Ibu akan diberikan atau mulai diperkenalkan ketika anak berusia di atas 6 bulan. Makanan Tambahan ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi terhadap tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI dan membentuk daya tahan tubuh serta perkembangan system imunologis anak terhadap makanan/minuman (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2017).

2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care, Post Natal Care, dan pembelajaran dini yang berkualitas

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Bank Dunia menyatakan bahwa antusias ibu untuk membawa anak ke posyandu semakin menurun dari 79% pada tahun 2007 ke 64% ditahun 2013. Dan masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan atau imunisasi yang baik. Kemudian masih ada ibu hamil yang belum mengkonsumsi sumplemen zat besi yang memadai serta layanan pembelajaran terhadap anak usia dini yang

berkualitas (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2017).

3) Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi

Salah satu penyebab faktor penyebab stunting yaitu kurangnya akses rumah tangga atau keluarga untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal sehingga keterjangkauan pangan yang bergizi menjadi salah satu hal yang harus distabilkan oleh pemerintah.

4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Kurangnya akses atau penyediaan air bersih dan sanitasi ini perlu dilakukannya intervensi sensitive oleh pemerintah. Karena berdasarkan data dilapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka dan belum memiliki jamban yang sehat. Kemudian masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses atau penyediaan air bersih, dengan adanya penyediaan air bersih nantinya mampu memberikan sumber kehidupan yang layak dan sehat sehingga permasalahan balita pendek atau stunting dapat menurun.

**e) Dampak *stunting* bagi perkembangan.**

Dampak stunting ini sangat besar terhadap tumbuh kembang anak dan juga perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Stunting dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia di bawah dua tahun. Pada umumnya anak-anak yang terkena dampak stunting akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan motoriknya dan ini akan mempengaruhi



produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, anak stunting juga memiliki resiko yang lebih besar terhadap penyakit menular seperti diabetes, obesitas dan penyakit jantung pada saat dewasa. dan dampak stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak ini sangat dirugikan pada saat beranjak dewasa.

### 1.7. Definisi Operasional

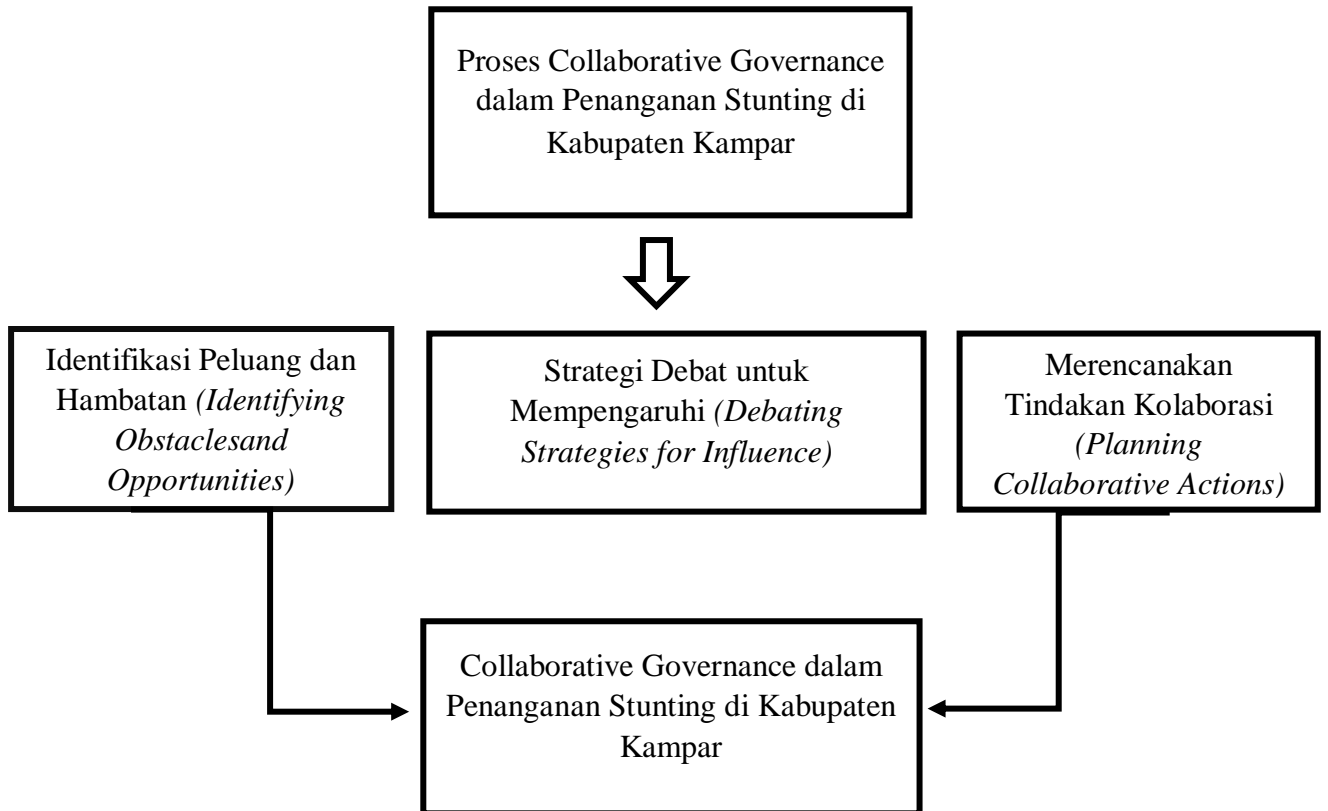
**Tabel 1. 4 Kerangka Operasional**

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Proses Collaborative Governance	Identifikasi Hambatan dan Peluang ( <i>Identifying Obstacles and Oppurtunities</i> )	1. Apa masalah utama yang harus diatasi 2.Siapa kunci yang mempengaruhi dari permasalahan yang akan diselesaikan 3. Apa yang bisa dicapai bersama.
		Strategi Debat Untuk Mempengaruhi ( <i>Debating Strategies For Influence</i> )	1.Apa cara paling efektif untuk mendapatkan perubahan. 2.Kelompok mana yang dapat mendukung dan menentang dalam upaya yang dilakukan. 3. Siapa lagi yang harus dilibatkan
		Merencanakan Tindakan Kolaborasi( <i>Planning Collaborative Actions</i> )	1.Apa yang bisa dilakukan pertama kali. 2. Mengukur pengidentifikasi dari setiap proses yang dilakukan. 3. Bagaimana kolaborasi dapat dipertahankan

### 1.8. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian, sebagai berikut :

## Bagan 1. 1 Kerangka Pikir



### 1.9. Metode Penelitian

#### 1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan berpikir deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dikarenakan dalam mengatasi masalah dibutuhkan data secara langsung yang berkaitan. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap permasalahan yang ada, menjelaskan keadaan yang terkait

dengan grounded theory, dan lebih memahami pengembangan akan suatu fenomena yang ada (I. Gunawan, 2013).

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terkait dengan Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kampar ini adalah sebagai berikut

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berlokasi, di Jl. Dr. Rahman Saleh No 22, Kecamatan Bangkinang, Provinsi Riau.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar, berlokasi di Jl. M. Yamin, Kecamatan Bangkinang Kota, Kampar, Riau.
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar, berlokasi di Jl. Lingkar, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kampar, Riau.
- 4) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Riau.
- 5) Pertamina Hulu Rokan RRC Rumbai, berlokasi di Lembah Damai, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau.

### **1.9.3. Jenis Data**

#### **a) Data Primer**

Data primer atau data utama didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara kemudian hasilnya diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi atau

kata. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara. Adapun data primer dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 5 Data Primer Penelitian**

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar	Dinas PPKB3A Kabupaten Kampar	Wawancara dan Dokumentasi
Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	Wawancara dan Dokumentasi
Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar	Bappeda Kabupaten Kampar	Wawancara dan Dokumentasi
Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Wawancara dan Dokumentasi
Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Kampar	Pertamina Hulu Rokan RRC Rumbai	Wawancara dan Dokumentasi

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder, merupakan proses pengambilan data dari sumber yang telah tersedia atau sudah ada sebelumnya, contoh dari data sekunder antara lain adalah: buku, media massa, jurnal-jurnal, arsip-arsip, dokumen, dan dokumen-dokumen

yang terkait dengan kebutuhan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 6 Data Sekunder Penelitian**

Nama Data	Sumber
Profil dan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	Web Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar <a href="https://dinkes.kamparkab.go.id">https://dinkes.kamparkab.go.id</a>  <a href="https://dinkes.kamparkab.go.id/artikel-detail/168/hasil-analisis-data-pengukuran-stunting-kab-kampar-september-2022">https://dinkes.kamparkab.go.id/artikel-detail/168/hasil-analisis-data-pengukuran-stunting-kab-kampar-september-2022</a>
Profil dan Data Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar	Web Resmi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar <a href="https://dppkb.kamparkab.go.id/">https://dppkb.kamparkab.go.id/</a>
Profil dan Data Bappeda Kabupaten Kampar	Web Resmi Bappeda Kabupaten Kampar <a href="https://bappeda.kamparkab.go.id/">https://bappeda.kamparkab.go.id/</a>
Regulasi Kepala Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar	Surat Keputusan Bupati Kampar Tentang Stunting

**c) Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang telah paham serta terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian

merupakan sesuatu baik itu berupa benda, orang, lembaga, organisasi yang sifat keadaanya diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu informan yang relevan dalam memberikan informasi mengenai *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 1. 7 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Rismadani S.GZ	PJ Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
2.	Afni, S.Gz, M.K.M.	Sub Koordinator Pendayagunaan PLKB Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar
3.	Poppy Wulandari, SKM, M.KL	Sub Koordinator Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Kampar
4.	Wanda Lasepa, S.Gz,M.Gizi	Pusat Kajian Gizi Universitas Pahlawan
5.	Winda Damelia	Koordinator Program CSR Pertamina Hulu Rokan

*Sumber : Olahan Penulis*

Dengan pendeskripsian yaitu Ibuk Rismadani S.GZ sebagai PJ Gizi Dinas Kesehatan, Ibuk Afni S.Gz, M.K.M sebagai Sub Koordinator Pendayagunaan PLKB Dinas PPKBP3A dan Ibuk Poppy Wulandari, SKM,M.KL sebagai Sub Koordinator Sosial dan Budaya Dinas Bappeda adalah informan Penelitian Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar serta termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar, kemudian Ibuk Wanda Lasepa, S.Gzs, M.Gizi sebagai Pusat Kajian Gizi Universitas Pahlawan adalah informan

penelitian yang mewakili Akademisi maupun Universitas. Sedangkan Ibuk Winda Damelia sebagai Koordinator Program CSR Pertamina Hulu Rokan yang mewakili salah satu perusahaan (pihak swasta) yang berkomitmen membantu penurunan stunting melalui program dana CSR.

#### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu tahapan untuk menyatukan data dengan menggunakan berbagai cara atau teknik-teknik yang sudah ditentukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan berbagai data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

##### **a) Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data utama penelitian melalui cara tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terkait dengan proses atau pelaksanaan Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting serta regulasi-regulasi di Kabupaten Kampar. Sistem wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya adalah terlebih dahulu memberikan pertanyaan sebagai pedoman namun masih mungkin dilakukan modifikasi pertanyaan seiring dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

**Tabel 1. 8 Narasumber Wawancara Penelitian**

No	Instansi	Narasumber	Jumlah
1.	Dinas PPKBP3A	Afni, S.Gz, M.K.M.	1 Orang

1.	Dinas Kesehatan	Rismadani S.GZ	1 Orang
3.	Bappeda	PoppyWulandari, SKM, M.KL	1 Orang
4.	Universitas Pahlawan	Wanda Lasepa, SGz,M.Gizi	1 Orang
5.	Pertamina Hulu Rokan	Winda Damelia	1 Orang

#### b) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi agar data yang dihasilkan lebih akurat dan lebih jelas dilakukan dengan cara merekam, mencatat hasil wawancara, video ataupun gambar foto selama penelitian berlangsung.

#### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif terdapat bagian analisis data sebelum terjun ke lapangan. Menurut Sugiyono dalam (Bruno, 2019) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses dalam penyusunan secara terstruktur dari data yang didapatkan dari berbagai teknik yang dilaksanakan dan dijabarkan ke dalam berbagai unit, melalui sintesis, kemudian di susun dan dipilih yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan sehingga dengan mudah dimengerti oleh orang lain ataupun diri sendiri. Kemudian menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan usaha yang dilaksanakan dengan mengelompokkan data, memilih-milih data menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesiskannya, menemukan pola, dan hal yang



penting untuk dapat dipelajari. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah atau tahapan:

#### A. Pengumpulan data

Dalam tahap pengumpulan data ini keseluruhan data yang dilakukan oleh peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dilaksanakan dengan turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan pengumpulan data dan memilah data yang dianggap penting terkait pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari data di instansi-instansi maupun stakeholder yang terlibat dalam Collaborative Governance terhadap penanganan stunting di Kabupaten Kampar.

#### B. Reduksi data

Tahapan reduksi data dilakukan dengan merangkum ataupun menyeleksi beberapa hal yang dikira penting kemudian dicari tema dan pola atau dengan kata lain tahapan ini merupakan tahap dalam menyederhanakan dan memilih temuan data yang sudah didapatkan di lapangan. Pada tahap ini peneliti akan merangkum dan memilih poin-poin pentingnya. Reduksi data ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Namun pada tahap reduksi data ini juga dimulai saat peneliti sudah mulai mengerucut ke lokasi penelitian di Dinas-Dinas yang terlibat dalam Collaborative Governance di Kabupaten Kampar. Dari hasil pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi) di lokasi penelitian tadi kemudian disederhanakan lagi dan memilih atau menyeleksi poin yang penting.

### C. Penyajian data

Tahapan penyajian data ini biasanya disajikan dengan bentuk penjabaran atau uraian singkat, bagan, dan korelasi antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada hakikatnya penyajian data ini menjelaskan keseluruhan informasi yang sudah terkumpul. Setelah mendapatkan poin-poin penting pada tahapan reduksi data, selanjutnya peneliti akan membuat sajian data yang mendeskripsikan temuan mengenai bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan stunting di kabupaten kampar. Sajian data informasi ini diperoleh dengan metode sebelumnya dan informasi tersebut tentunya sudah diseleksi dan dikerucutkan berdasarkan penting atau tidaknya.

### D. Tahapan Verifikasi

Tahapan terakhir dari analisis data adalah tahap verifikasi atau biasa disebut dengan tahapan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang valid akan penelitian dan menemukan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan tahap awal pada penelitian ini mungkin kapan saja bisa berubah, hal tersebut terjadi apabila peneliti menemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data. Apabila peneliti pada saat mengumpulkan data dan ditemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya. Dari hasil deskripsi terkait collaborative governance dalam penanganan stunting di kabupaten Kampar pada tahap penyajian data, selanjutnya dilakukanlah penarikan kesimpulan sementara, kesimpulan ini akan terus berkembang karena kemungkinan mendapatkan data dan temuan tambahan

mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan stunting di kabupaten kampar. Apabila data dan temuan sudah dirasa benar dan valid maka akan ditarik kesimpulan akhir.

### Bagan 1. 2 Bagan Analisis Data

